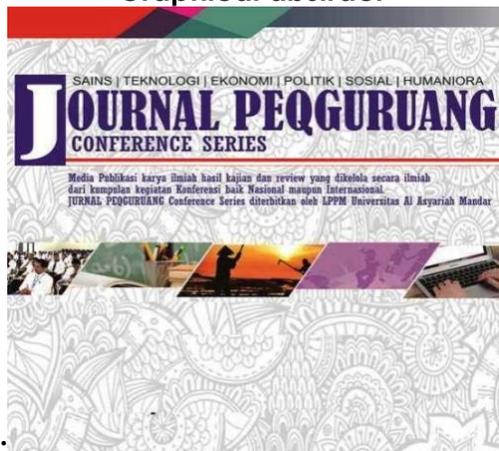


Graphical abstract



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ALOKASI DANA DESA TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BOTTO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹Nurbia*, ²Muhammad Nadir, ³Rezki Aziz

Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding Author

*nurbiah97@gmail.com

Abstract

This study discusses community perceptions of the allocation of village funds related to infrastructure development village autonomy is genuine rounded and whole autonomy and not a gift from the government should be obliged to respect the original autonomy owned by the village. Based on permendagri No 113 /2014 chapter II article (2) paragraph 1 concerning village financial management including village funds must be in accordance with management principles namely accountability, transparency as well as efecincy,. The type of research used in this study used direct observation an indepth interviews of 21 respondents namely the village secretary, youth leaders and community leaders in the botto village. This research methodology uses a qualitative descriptive approach. From the results of the study it can be seen that the community's perception of the allocation of village funds related to infrastructure development is not fully carried out by means of transparency accuntability, participation and efecincy.

Keywords: *Comunty Perception of The Allocation of Village Funds Related to Infrastructure Development*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Terkait Pembangunan Infrastruktur. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Berdasarkan permendagri No.113/2014, Bab II pasal 2 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan desa termasuk dana desa harus sesuai asas pengelolaan yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi,maupun efesiensi.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara langsung secara mendalam sebanyak 21 respondeng yakni sekretaris desa, aparat desa, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat didesa botto. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa presepsi masyarakat terhadap alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta efesiensi.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Terkait Pembangunan Infrastruktur*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1146>

Received : 20 Juli 2020 | Received in revised form : 17 Agustus 2020 | Accepted : 25 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari sesuatu (KBBI). Berdasarkan hasil temuan empiris Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan individu masing-masing. Davidoff (1981) dalam (Walgito, 2005) menjelaskan bahwa Dana Desa dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan individu masing-masing. Davidoff (1981) dalam (Walgito, 2005) menjelaskan bahwa persepsi itu bersifat personal dimana persepsi dikemukakan karena Perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang tidak sama sehingga dalam mempersepsikan suatu stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain.

Persepsi masyarakat adalah suatu proses penafsiran stimuli yang diperoleh indera manusia. Proses indera menangkap stimuli dinamakan sensasi. Jadi sensasi stimuli yang dilingkungan. Agar stimuli memiliki makna-makna komunikasi melakukan persepsi yang bergantung pada pikiran dan perasaannya (Suranto, 2011:63)

Pemerintahan dan masyarakat desa mulai mengelola pembangunan di desanya secara lebih otonom (Alam, 2017). Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Sedangkan dalam arah dan Pokok Kebijakan Dana Desa Tahun 2019.

1. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah,
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan yaitu, kinerja penerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi; dan
3. Mempertajam Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar serta memperluas kesempatan kerja.

Pengelolaan Dana Desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang artinya pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (renyowijoyo 2013).

Alokasi dana desa di desa botto, tidak menganut sistem Transparan, Partisipasi, dan efisiensi maupun akuntabilitas. dikarenakan masyarakat tidak mau terlalu jauh ikut campur dalam urusan pemerintahan, dikarenakan ada sebagian masyarakat

yang tidak memahami dalam urusan pemerintahan, dan ada yang faham dalam urusan pemerintah desa namun segaja tidak ikut campur karena menurutnya tidak penting karena melawan/menolak aturan yang dikeluarkan dari desa sama saja membuang-buang waktu tidak akan didengarkan oleh pemerintah tersebut, namun ada juga yang sangat faham atas aturan alokasi dana desa tetapi semua percuma saja, karena mereka hanya sebagian kecil yang menolak sebagian dari mereka ini selalu kalah.

Masyarakat di desa Botto lebih disibukkan dengan kepentingan sendiri mereka hanya pandai berbicara dibelakan namun tidak berani melawan. Dan di sisi lain Alokasi Dana Desa Terkait Pembangunan diharapkan menjadi ruang bagi artikulasi politik, partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa.

Misalnya dalam Undang-Undang 2014 bab III pasal 7 tentang Penataan Desa, desa berhak mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam membangun desa masing-masing, selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari aparat desa serta masyarakat juga menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang memiliki kepentingan (Masyarakat dan aparat desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi pengelola keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan (renyowijoyo2013)

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah study kasus (case studies) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Maman (2002:3), bahwa penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat studi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal 22 April 2020. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2007:90). Adapun yang menipulasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Desa botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2006:118). Pada penelitian ini penulis mengambil sampel yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel tidak diambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti (Sugiyono, 2007:96)

Teknik pengumpulan Data

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan:

a. Observasi

Yakni pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan dalam melakukan pengamatan terhadap masyarakat dalam hal ini responden. Observasi digunakan untuk mengamati objek yang diteliti dengan menggunakan seluruh alat indra untuk memperoleh hasil yang diteliti.

b. Wawancara

Metode wawancara mendalam adalah metode wawancara dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus untuk menggali informasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam menganalisa data, penyusun akan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini:

a. Pengumpulan data

Disini penyusun akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

b. Penilaian data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diteliti dengan memperhatikan prinsip validitas, sehingga data yang relevan saja yang akan digunakan.

c. Penafsiran data

Selanjutnya, akan dilakukan analisa data dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran dan hubungan sebab akibat dari faktor-faktor yang akan diteliti. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan pendekatan interpretative.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan, bahwasanya pemerintah desa dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya persepsi masyarakat terhadap alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur karena untuk mempermudah akses perjalanan.

Alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur dilaksanakan sosialisasi pertama dilakukan musyawarah dusun para kepala dusung memberikan aspirasi menceritakan layaknya bantuan alokasi dana desa yang diajukan, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan mengadakan musrembang dari sinilah pemerintah desa dan tokoh masyarakat mengambil kesimpulan lokasi penetapan pembangunan infrastruktur.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat pada dasarnya dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai pelaksanaan alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tentang alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur didesa botto telah memberikan respon positif dan respon negatif terhadap hal tersebut, karena dengan adanya sosialisasi dari pemerintah desa maka dari itu masyarakat mengatakan pemerintah desa masih belum transparan dalam mensosialisasikan dana desa.

Dari beberapa hasil ungkapan narasumber, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang terkait dengan apakah alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur didesa botto sudah merata, dari 21 jumlah responden mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur didesa botto belum merata dengan alasan yang berbeda-beda sebagian mengatakan pembangunan belum merata dikarenakan memprioritaskan yang layak dibangun dan yang lain mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur belum merata dikarenakan pemerintah desa tidak terlalu transparan dalam menanganai hal tersebut dan jauh lebih mementingkan keinginannya.

Alokasi dana desa terkait pembangunan infrastruktur dari seluruh rangkaian yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan agar tercapainya sistem pembangunan infrastruktur yang baik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk perkembangan desa oleh karena itu masyarakat dilibatkan dan dimintai persetujuan untuk pembangunan infrastruktur.

Dari hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat didesa botto dengan jumlah responden 21 orang mengatakan bahwa dengan dilibatkannya masyarakat maka sistem pembangunan akan berjalan baik, melakukan bentuk transparan terhadap masyarakat, ikut serta dalam penanganan pembangunan infrastruktur dan tidak untuk mementingkan keuntungan dari alokasi dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Terkait Pembangunan Infrastruktur di Desa Botto masih kurang transparan, akuntabilitas, partisipasi maupun efisiensi, diperlukan peningkatan dalam pembangunan agar merata.

Namun dalam penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya Alokasi Dana Desa Terkait Pembangunan Infrastruktur Di Desa Botto masih kurang melibatkan masyarakat sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti masih kurang transparan, akuntabilitas, partisipasi serta partisipasi.

4. SIMPULAN

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang penggunaannya 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional 70 persen untuk belanja public dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa terkait pembangunan infrastruktur desa Botto berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya dari sebagian masyarakat mengemukakan persepsi yang positif dengan alasan bahwa pembangunan infrastuktur dalam hal ini drenase dan jalan tani dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat teruma bagi mereka yang berkecimpung sebagai petani sebagai upaya untuk memperlancar akses mereka membawa hasil panennya menuju jalan utama, sosialisasi mengenai alokasi dana desa terkait embangunan infrastruktur mengemukakan sebuah persepsi negatif dengan alasan pemerintah desa masih kurang transparan menangani alokasi dana desa dan hanya melibatkan orang-orang tertentu. Meski demikian terdapat terdapat pula masyarakat yang mengemukakan persepsi positif dengan melihat dampak positif yang akan dirasakan nantinya.

Adapun dalam penelitian ini Kepada pemerintah setempat yakni Desa Botto agar tetap menjalin keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam persoalan pembangunan infrastruktur agar tercipta ketentraman seperti apa yang diinginkan dan lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Renyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba.Edisi3: Jakarta. Mitra Wacana Media*
- Suranto,2011. Komunikasi Internasional Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Sugiyono. 2004. Metode Peneitian.Bandung Alfabeta.*
- Sugiyono. 2007. Statika Untuk Penelitian. Bandung.*
- Walgito, P. D (2005) Pengantar Yogyakarta: CV. Andi Offset.*
- Permendagri No. 113/2004 Bab II pasal II Ayat (1)*
- Undang-undang 2014 Bab III pasal 7 tentang Penataan Desa.*

Alam, S. (2017). Studi Penerapan Pendekatan Community Led Assessment And Planning Process (Clapp-gpi) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Rpjm-desa) di Kabupaten Bantaeng. *Pepatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 85-100.